

## ■ DPRD Desak BPK Tingkatkan Pemeriksaan Proyek Dahului Anggaran Rp 172 M Disorot



**Temuan BPK Proyek Dahului Anggaran 2014**

- Kerugian daerah se Jateng Rp 50 miliar
- Kerugian Pemprov Rp 2,9 miliar
- Potensi kerugian pelaksanaan mendahului anggaran Rp172 miliar
- Potensi kerugian lain belum dihitung
- BPK meningkatkan pemeriksaan menjadi pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- Hasil temuan LHP BPK memunculkan Opini WTP dengan 38 temuan, dan 108 rekomendasi

Sumber:  
DPRD Jateng dan  
BPK RI Perwakilan Jateng, M9

Grafis: Siswanto

SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menyayangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melewatkan pemeriksaan terhadap kegiatan mendahului anggaran. Hal itu terjadi pada pelaksanaan APBD 2014 Pemprov Jateng. Dewan mendesak agar BPK meningkatkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, potensi kerugian negara terhadap pelaksanaan kegiatan mendahului anggaran mencapai Rp172 miliar. Sementara ada hal lain yang juga berpotensi merugikan negara seperti pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS Pemprov Jateng yang menyalahi aturan. Namun berapa kerugiannya, Rukma belum tahu secara persis, lantaran ada yang terlewatkan BPK.

"Jadi dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK, menghasilkan 33 temuan, dengan 108 rekomendasi. Potensi ke-

Bersambung ke hal 7 kol 3

### Proyek .....

(Sambungan hlm 1)

rugian mungkin bisa bertambah, kalau nanti diperiksa lanjutan. Makanya kami mendesak agar BPK mengaudit untuk tujuan tertentu," terang Rukma usai rapat bersama BPK di ruang Banggar DPRD Jateng, kemarin.

Politikus PDIP itu menambahkan, banyak pelaksanaan mendahului anggaran di lapangan, dalam temuan Komisi D. Seharusnya pelaksanaan kegiatan mendahului anggaran digunakan untuk kegiatan mendesak seperti bencana. "Anggarannya justru digunakan untuk perawatan biasa," timpalnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov juga memberikan tunjangan kesehatan, padahal PNS sudah dicover dengan BPJS Kesehatan. Pemprov juga melakukan pemborosan anggaran lantaran memberikan santunan pada pensiunan. Tak hanya itu, TPP ternyata diberikan bagai-

kan *gebyah uyah* kepada semua PNS dan tenaga harian lepas (Harlep). Hal itu jelas menyalahi aturan lantaran pemberian TPP seharusnya memiliki kriteria.

"Tadi BPK kami jelaskan, tapi dia tidak 'ngeh', makanya kami minta pemeriksaan lanjutan. Masalah TPP, harusnya diberikan dengan lima kriteria. Kriterianya ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi, dan kinerja. Gaji saja di anggaran 2014 cuma Rp1 triliun, malah TPP-nya Rp1,1 triliun, kan itu jomplang," terangnya.

Kerugian yang sudah ditemukan BPK sendiri, terang Rukma mencapai Rp50 miliar pada daerah se-Jateng. Untuk Pemprov sendiri rugi Rp2,9 miliar. Hanya ada satu kota yakni Surakarta yang tak sampai mengalami kerugian. Jika ada temuan yang lebih besar, maka hal itu justru bisa mengarahkan pada ranah hukum baik perdata ataupun pidana. Tak dipungkiri Rukma, potensi temuan akan semakin bertambah.

"Ini pertama kalinya pelaksanaan anggaran banyak temuan dan rekomendasi. Kami akan menuntaskan, dan menindaklanjuti temuan BPK seoptimal mungkin," tutur dia.

Kepala BPK Perwakilan Jateng Hery Subowo tak menampik potensi kerugian negara atas pelaksanaan mendahului anggaran tidak semuanya masuk dalam LHP BPK. Ia ber alasan data yang diterimanya tak menunjukkan pada hal tersebut. Menurutnya pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas permintaan DPRD.

"Ini kan pemeriksaan keuangan baru di kulitnya, kalau mau tahu isi di dalamnya, maka harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kami sudah melaksanakan kesiapan, ini sudah ada revisi perubahan objek pemeriksaan," terang Hery.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK, lanjutnya, merupakan pemeriksaan berbasis risiko, yakni risiko intern di mana tak ada pengendalian. Kedua yakni risiko kontrol atau pe-

ngendalian, serta risiko deteksi.

"Misal ada pekerjaan atau transaksi yang tidak kena sampling padahal di situ kena masalah, itu juga risiko yang harus dipertimbangkan. Karena tidak mungkin bagi kami untuk meneliti semua pekerjaan," ulas Hery.

Dari kerugian negara di Pemprov Jateng sebesar Rp2,9 miliar yang sudah disetor ke kas negara mencapai Rp2,5 miliar untuk memulihkan kerugian. Sementara kerugian di daerah yang mencapai Rp50 miliar sudah dipulihkan sebanyak Rp18 miliar. Kerugian negara yang dipulihkan, kata Heru, melalui proses administrasi dengan menyetorkan ke kas daerah. Namun kerugian negara yang diproses ke tindak pidana korupsi diproses dari unsur pidana yang dilambangkan *mens rea* dan *actus reus*.

"Ada niat jahat dan perbuatan melawan hukum. Kalau ada, maka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) silakan menindaklanjuti temuan BPK" tegas Hery. ■ M9—sn